



DPMDPPKB

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029



Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25611

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Telp (075) 2103000 Email: dpmdppkbpessel@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGANDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 000.7/37/DPMDPPKB/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam acuan kinerja yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan Tolak Ukur dalam Penilaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 22 Mei 2025

KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA, PENGANDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 000.7/37/DPMDPPKB/2025

TANGGAL 22 Mei 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 :

ESELON II :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas								
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	B (67)	B (68)	B (69)	B (69)	B (70)	B (70)	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (81,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (83,00)	
		Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	64 Nagari	72 Nagari	80 Nagari	88 Nagari	96 Nagari	
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	80	85	85	90	90	
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	62,89%	63,00%	63,15%	63,30%	63,45%	

ESELON III :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan)	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
		Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
2.	Meningkatnya Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari Memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu	85%	85%	90%	90%	95%	95%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan
4.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif	9,35%	11,29%	12,90%	14,52%	16,13%	17,74%
		Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) ≥ Rp. 10.000.000	7,69%	10,44%	13,19%	15,93%	18,68%	21,43%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi	85%	90%	90%	95%	95%	100%
		Persentase Pemerintahan Nagari Yang Menetapkan SOP Pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%	100%
6.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari	75%	80%	80%	85%	85%	90%
7.	Penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Rapat Koordinasi TPK Kabupaten Pesisir Selatan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Audit Kasus Stunting	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus
8.	Pembekalan Kampung KB	Pembinaan Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB
		Balai Penyuluh KB yang terbina	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB	15 Balai Penyuluh KB
9.	Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	Laporan Statistik Rutin	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Validasi Laporan SIGA	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Data dan Informasi Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

KINERJA OPERASIONAL :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Dinas	Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti	90%	92%	94%	96%	98%	100%
		Persentase Dokumen Publik dan dipublish	93%	94%	95%	96%	97%	98%
		Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran	90%	92%	94%	96%	98%	100%
2.	Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Dinas	Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Bimtek/Diklat/Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan untuk Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari	Jumlah Anggota Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat	37 Anggota	37 Anggota	37 Anggota	37 Anggota	37 Anggota	37 Anggota
		Jumlah Anggota LPMN yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN)	546 Anggota	546 Anggota	546 Anggota	546 Anggota	546 Anggota	546 Anggota
		Jumlah Anggota PKK yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	575 Anggota	575 Anggota	575 Anggota	575 Anggota	575 Anggota	575 Anggota
		Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	670 Pengelola Posyandu	670 Pengelola Posyandu	670 Pengelola Posyandu	670 Pengelola Posyandu	670 Pengelola Posyandu	670 Pengelola Posyandu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang Terinventarisasi dan Teridentifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen
5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan Dapat Melaksanakan Fungsi Pokja PKK	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan
		Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang aktif	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan
6.	Meningkatnya Peran Serta dan Gotong Royong Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong	85%	85%	90%	90%	95%	95%
		Persentase Masyarakat yang Mengikuti Forum Musyawarah Nagari	85%	85%	90%	90%	90%	95%
7.	Meningkatnya Kompetensi Nagari	Jumlah Nagari yang mengikuti Ajang Berprestasi/Lomba Nagari	8 Nagari	10 Nagari	12 Nagari	14 Nagari	16 Nagari	18 Nagari
		Jumlah Nagari yang menyusun Profil Desa	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari
8.	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus
9.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Nagari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Jumlah Pengurus UEM dan UPK yang Mengikuti Pelatihan	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus
		Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.	Meningkatnya Kerjasama Antar Nagari	Jumlah Kerjasama yang disepakati	32 Kerjasama	34 Kerjasama	36 Kerjasama	38 Kerjasama	40 Kerjasama	42 Kerjasama
		Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Terbentuk	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan
11.	Meningkatnya Manajemen Aparatur Pemerintahan Nagari	Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang
		Jumlah Nagari yang Melaksanakan Pilwana	58 Nagari	-	47 Nagari	-	47 Nagari	-
12.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang mengelola Keuangan Nagari sesuai aturan yang berlaku	Persentase Nagari yang menyusun APB Nagari Tepat Waktu	55%	60%	65%	70%	75%	80%
13.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap	75%	80%	80%	85%	85%	90%
14.	Meningkatnya Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari	Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari
15.	Meningkatnya Pelayanan KB	Jumlah Akseptor KB	2250 Orang	2250 Orang	2250 Orang	2250 Orang	2250 Orang	2250 Orang
		Jumlah Mitra Bangga Kencana	4 Mitra	4 Mitra	4 Mitra	4 Mitra	4 Mitra	4 Mitra
16.	Meningkatkan Kualitas Faskes Pelayanan KB	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Faskes	26 Faskes	26 Faskes	26 Faskes	26 Faskes	26 Faskes	26 Faskes
		Jumlah Nakes yang Mengikuti Pelatihan Teknis	8 Nakes	8 Nakes	8 Nakes	8 Nakes	8 Nakes	8 Nakes
17.	Meningkatnya Peranan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
18.	Meningkatnya Penyuluhan KB dan Ibu Balita KB	Jumlah Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB	91 Penyuluh KB
		Jumlah Penyuluhan KB yang dilakukan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan	2648 Penyuluhan
19.	Meningkatnya Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama	Persentase Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%
20.	Meningkatnya Layanan Konseling KB	Jumlah Pusat Konseling KB	58 Konseling	60 Konseling	62 Konseling	64 Konseling	66 Konseling	68 Konseling
21.	Meningkatnya Keaktifan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Jumlah Kelompok Kegiatan yang aktif	40 Poktan	40 Poktan	40 Poktan	40 Poktan	40 Poktan	40 Poktan
22.	Meningkatkan Pola Asuh dan Tumbuh Kembang Anak	Persentase Anak yang dipantau Tumbuh Kembangnya	85%	85%	90%	90%	95%	95%

Sumber Data : Bidang DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 :

Agar seluruh stakeholders Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persepsi yang sama terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. **Nilai RB Perangkat Daerah :**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai Reformasi Birokrasi ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Asesor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Formulasi : Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Laporan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

2. **Nilai AKIP Perangkat Daerah :**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Formulasi : Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

3. Jumlah Nagari Mandiri :

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indeks Desa (ID) mengukur pembangunan desa melalui 6 dimensi utama, yaitu : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa, yaitu : Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Formulasi : Jumlah Nagari yang memenuhi kriteria Nagari Mandiri

Sumber Data : Aplikasi ID, Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Kabupaten Pesisir Selatan dari Kemendes PDTT dan Buku Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah :

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Formulasi : Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri

Sumber Data : Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

5. **Persentase PUS yang Ber-KB :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Persentase PUS yang Ber-KB merupakan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran

Formulasi :

$\text{Persentase PUS yang ber-KB} = \frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan KB}}{\text{Jumlah Seluruh PUS}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

6. **Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, yaitu : pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dipimpin oleh Sekretaris

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah Laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Laporan Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

7. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait

Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari Instansi terkait

Sumber Data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

8. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh Bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk Bagian Sekretariat yang kemudian dirata-ratakan

Formulasi :

Jumlah Persentase Capaian Kinerja Bidang
----- X 100%
Jumlah Bidang dan Bagian Sekretariat

Sumber Data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

9. Jumlah Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Jumlah Inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan merupakan inovasi yang disusun oleh Seluruh Eselon III pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan inovasi sehingga menjadi inovasi DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan yang akan dinilai dalam ajang *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri setiap tahunnya

Formulasi : Jumlah Inovasi Setiap Eselon III

Sumber Data : Bagian Sekretariat dan Bidang DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

10. Persentase Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan Laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Formulasi :

Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan tepat waktu	X 100%
Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan	

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

11. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari merupakan peran yang sudah dijalankan, yaitu : melakukan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan bidang kesehatan. Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari adalah pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, selanjutnya peran dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, yaitu : menerima pengaduan dan menampung aspirasi masyarakat

Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

12. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari. Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan Pemerintahan Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari

Formulasi : Jumlah Kecamatan Se-Kab. Pesisir Selatan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)

Sumber Data : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

13. Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Lembaga Ekonomi merupakan pranata sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif}}{\text{Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat}} \times 100\%$

Sumber Data : Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

14. Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) ≥ Rp. 10.000.000 :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pernerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi kemajuan Nagari

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)}}{\text{Jumlah Seluruh Nagari yang ada}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Pemerintahan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

15. Jumlah Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi merupakan penggunaan Sistem Informasi untuk membantu Pemerintahan Nagari dalam mengelola Data dan Informasi dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan

Formulasi : Jumlah Nagari yang memanfaatkan Teknologi Informasi Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

16. Jumlah Pemerintahan Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : SOP Pelayanan Pemerintahan Nagari merupakan suatu pedoman atau Acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja Instansi Pemerintahan Nagari. Berdasarkan indikator teknis administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan

Formulasi : Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

17. Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Pemerintahan Nagari secara teknis dan disusun serta direkap oleh Pemerintahan Nagari yang tercatat sebagai aset Pemerintahan Nagari

Formulasi :

Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	X 100%
Jumlah Nagari yang ada	

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

18. Rapat Koordinasi TPK Kab. Pesisir Selatan :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari : Bidan Desa/Nagari, Kader TP-PKK dan Kader KB untuk melaksanakan Pendampingan Keluarga, meliputi : Penyuluhan, Fasilitasi Pelayanan, Rujukan dan Fasilitasi Penerimaan Program Bantuan Sosial kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan

Formulasi : Jumlah Rapat Koordinasi TPK Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

19. Audit Kasus Stunting :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Audit Kasus Stunting merupakan upaya identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveylans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penampisan kasus-kasus yang sulit, termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit beresiko stunting, yaitu : Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta/Balita

Formulasi : Jumlah Kasus Stunting yang ada di Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

20. Pembinaan Kampung KB :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan satuan wilayah setingkat Kelurahan dimana terdapat Integrasi dan Kofergensi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penguatan Institusi Keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat

Formulasi : Jumlah Kampung KB di Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

21. **Balai Penyuluh KB yang terbina :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Balai Penyuluh KB merupakan balai yang terletak di wilayah Kecamatan serta sebagai wadah kelembagaan penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditingkat Kecamatan sebagai Lembaga Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD di Kabupaten

Formulasi : Jumlah Balai Penyuluh KB di Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

22. **Laporan Statistik Rutin :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Laporan Statistik Rutin merupakan laporan yang dihasilkan melalui Sistem Informasi pengelolaan data statistik rutin, yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Formulasi : Jumlah Dokumen Laporan yang disampaikan tiap bulan

Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

23. Validasi Laporan SIGA :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Validasi Laporan SIGA merupakan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara menunjukkan sesuatu yang sesuai baik bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dan menunjukkan keabsahannya.

Formulasi : Jumlah Dokumen Laporan SIGA yang disampaikan tiap bulan

Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

24. Data dan Informasi Keluarga :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Data dan Informasi Keluarga merupakan data dan informasi dari hasil pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data serta menyebarluaskan data berdasarkan Pendataan Keluarga

Formulasi : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga yang disampaikan

Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

25. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di Media Sosial, Media Cetak maupun Melalui Kotak Saran yang telah disediakan

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/Saran}} \times 100\%$

Sumber Data : Media Sosial, Media Cetak dan Kotak Saran

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

26. Persentase Dokumen Publik dan dipublish :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Dokumen Publik dan dipublish merupakan dokumen yang diupload ke website PPID DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Dokumen Publik yang dipublish}}{\text{Jumlah Dokumen Publik}} \times 100\%$

Sumber Data : Website PPID DPMDPPKB Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

27. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan terkait dengan perkantoran, meliputi : sarana dan prasarana, operasional kantor dan sejenisnya

Formulasi :

Jumlah Pelayanan yang dilakukan	X 100%
Jumlah Pelayanan yang harus dilakukan	

Sumber Data : Sekretariat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

28. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Sekretariat secara teknis disusun oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Formulasi : Jumlah Dokumen Perencanaan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Sekretariat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

29. Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Bimtek/Diklat/Pelatihan :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peningkatan Kapasitas SDM ASN dimaksudkan agar ASN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari Dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah ASN DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan yang mengikuti diklat Tahun n

Sumber Data : Sekretariat DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

30. Jumlah Anggota Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat merupakan peningkatan kapasitas Lembaga Adat dimaksudkan agar Lembaga Adat dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota Lembaga Adat yang mengikuti diklat Tahun n

Sumber Data : Lembaga Adat Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

31. **Jumlah Anggota LPMN yang mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : LPMN yang mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) merupakan peningkatan kapasitas LPMN dimaksudkan agar LPMN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota LPMN yang mengikuti diklat Tahun n

Sumber Data : LPMN Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

32. **Jumlah Anggota PKK yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : PKK yang mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas PKK dimaksudkan agar PKK dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota PKK yang mengikuti diklat Tahun n

Sumber Data : PKK Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

33. Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dimaksudkan agar Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang mengikuti diklat Tahun n

Sumber Data : Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

34. Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang Terinventarisasi dan Teridentifikasi :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara teknis disusun dan direkap oleh Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

Formulasi : Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Kerapatan Adat Nagari (KAN) Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

35. Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan Dapat Melaksanakan Fungsi Pokja PKK :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kelembagaan PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia

Formulasi : Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan dapat melaksanakan Fungsi Pokja PKK

Sumber Data : Kelembagaan PKK Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

36. Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Aktif :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi merupakan kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi serta saling memperkuat antar program dan kegiatan

Formulasi : Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi

Sumber Data : Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

37. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan masyarakat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Nagari

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

38. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Forum Musyawarah Nagari :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang) merupakan musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari secara bersama-sama dengan pihak terkait dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Nagari untuk dapat menyampaikan aspirasi pada Forum Musyawarah Nagari

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

39. Jumlah Nagari yang Mengikuti Ajang Berprestasi/Lomba Nagari :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Lomba Nagari merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah dengan melakukan penjaringan Desa/Nagari berprestasi untuk dapat mengikuti ajang berprestasi/Lomba Nagari

Formulasi : Jumlah Nagari yang mengikuti Lomba Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

40. Jumlah Nagari yang Menyusun Profil Desa :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Profil Desa merupakan dokumen yang berisikan data dan informasi mengenai desa

Formulasi : Jumlah Nagari yang menyusun Profil Desa Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

41. Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) merupakan usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari dan berbadan hukum. Selanjutnya Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) merupakan mempunyai tugas untuk mengelola operasi dan pemeliharaan sistem air minum yang sudah dibangun

Formulasi : Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : BUM Nag dan KP-SPAMS Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

42. Jumlah Pengurus UEM dan UPK yang Mengikuti Pelatihan :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) merupakan kegiatan yang dilakukan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari

Formulasi : Jumlah Pengurus UEM yang mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

43. **Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi kemajuan Nagari

Formulasi : Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

44. **Jumlah Kerjasama yang disepakati :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kerjasama Antar Nagari merupakan suatu rangkaian kegiatan secara bersama-sama antar Nagari dengan Pihak Ketiga dalam bidang Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Formulasi : Jumlah Kerjasama yang disepakati Antar Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

45. Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Terbentuk :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

Formulasi : Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

46. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan merupakan semua unsur yang terlibat didalam Pemerintahan Nagari

Formulasi : Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan Tahun n

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

47. Jumlah Nagari yang Melaksanakan Pilwana :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Formulasi : Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

48. Persentase Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan Laporan APB Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Formulasi :

Jumlah Nagari yang menyusun APB Nagari tepat waktu
----- X 100%
Jumlah Nagari yang ada

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

49. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Pemerintahan Nagari secara teknis dan disusun serta direkap oleh Pemerintahan Nagari yang tercatat sebagai aset Pemerintahan Nagari

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap}}{\text{Jumlah Nagari yang ada}} \times 100\%$$

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

50. Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peta Batas Nagari merupakan peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, meliputi : pilar batas, garis batas, topografi perairan dan transportasi

Formulasi : Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

51. **Jumlah Akseptor KB :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Akseptor KB merupakan peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk mencegah kehamilan baik melalui program atau non program

Formulasi : Jumlah Akseptor KB Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

52. **Jumlah Mitra Bangga Kencana :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Mitra Bangga Kencana merupakan perseorangan atau lembaga Pemerintah, organisasi swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana

Formulasi : Jumlah Mitra Bangga Kencana Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

53. **Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Faskes :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat

Formulasi : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

54. **Jumlah Nakes yang Mengikuti Pelatihan Teknis :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Tenaga Kesehatan (Nakes) yang mengikuti Pelatihan Teknis merupakan peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan (Nakes) dimaksudkan agar Tenaga Kesehatan (Nakes) dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Mengikuti Pelatihan Teknis

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

55. Jumlah Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kader Kampung KB, Para Lintas Sektor, Pemerintahan Nagari maupun PLKB Kecamatan di Kampung KB dalam mengadvokasi/membuat proposal/mengajak aktif turut serta dalam menggiatkan dan merealisasikan semua kegiatan pada program Kampung KB, sehingga dengan bantuan/fasilitasi pendampingan, penyuluhan maupun sosialisasi, baik pada Bidang Pemukiman, Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lain sebagainya

Formulasi : Jumlah Kegiatan Lintas Sektor di Kampung KB Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

56. Jumlah Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD merupakan perpanjangan tangan Pemerintah khususnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam melaksanakan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana maupun Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Formulasi : Jumlah Penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

57. Jumlah Penyuluhan KB yang dilakukan :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Penyuluhan KB yang dilakukan merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Nagari tentang pentingnya Keluarga Berencana dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan pembangunan di Nagari

Formulasi : Jumlah Penyuluhan KB yang dilakukan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

58. Persentase Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari berbagai aspek, yaitu : ekonomi, kesehatan, mental/psikologi

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Perkawinan Pertama diatas 20 Tahun}}{\text{Jumlah Perkawinan yang sudah siap dari berbagai aspek}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan dan BPS Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

59. Jumlah Pusat Konseling KB :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pusat Konseling KB merupakan proses pelayanan konseling yang dilakukan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan layanan dan dukungan kepada keluarga dalam hal perencanaan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan secara menyeluruh

Formulasi : Jumlah Pusat Konseling KB Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

60. Jumlah Kelompok Kegiatan yang aktif :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kelompok Kegiatan (Poktan) merupakan wadah kegiatan Program Bangga Kencana diharapkan mampu menjalankan Program Bangga Kencana secara menyeluruh melalui Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dihadiri oleh Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) di Kampung KB

Formulasi : Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang aktif Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

61. Persentase Anak yang dipantau Tumbuh Kembangnya :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemantauan Tumbuh Kembangnya merupakan suatu kegiatan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan pertumbuhan (status gizi kurang atau gizi buruk, anak pendek), penyimpangan perkembangan (terlambat bicara) dan penyimpangan mental emosional anak (gangguan konsentrasi dan hiperaktif). Pemantauan tumbuh kembang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak serta menemukan secara dini adanya gangguan tumbuh kembang sehingga dapat ditindaklanjuti segera agar hasilnya lebih baik

Formulasi :

Jumlah Anak yang dipantau Tumbuh Kembangnya	X 100%
Jumlah Anak yang ada di Kab. Pesisir Selatan	

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001